ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA KAB.KUBU RAYA DESA SUNGAI ENAU

SKRIPSI

Putri Maharani
B1033211039

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Maharani

Nim : B1033211039

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : S1 Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul proposal Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Sungai Enau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul tersebut diatas, secara keseluruhan adalah murni dari karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila didalamnya terdapat kesalahan dan keliruhan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan proposal skripsi dengan judul tersebut di atas. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 25 Juli 2025



Putri Maharani
NIM. B103321103

Dipindai dengan CamScanner

PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Putri Mahrani
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	: 23 Januari 2026
Judul Skripsi	: Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan Dan belanja daerah (APBD) sebagai indicator Kinerja keuangan kabupaten kubu raya Desa Sungai enau

Menyatakan bahwa Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 15 Februari 2026

(Putri Maharani)

Nim.B1033211033

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR YURIDIS

ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA KAB.KUBU RAYA DESA SUNGAI ENAU

Penanggung Jawab Yuridis

Putri Maharani
B1033211039

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 12 Februari 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Dr. Khristina Yunita., S.E., M.Si., Ak, CA NIP. 197906182002122003		
2.	Sekretaris Penguji	Angga Permadi Karpriana, S.E, M.Acc.,Ak NIP. 198611292014041001	26/2/2026	
3.	Penguji 1	Ira Grania Mustika,S.E.,M.M NIP. 196911151996032002	26/2/2026	
4.	Penguji 2	Tiya Nurfauziah,S.AK.,M.AK NIP. 199709302022032017	24/2/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 24 APR 2026
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita., S.E., M.Si., Ak, CA
NIP. 197906182002122003

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-nya yang telah diberikan sehingga proposal peneliian yang berjudul ”Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di sungai Enau” dapat terselesaikan. Penulisan proposal skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini dengan penuh ras hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terimah kasih ;

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku rektor Universitas Tanjungpura
2. Kepada Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura
3. Kepada Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., MM.Ak., selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
4. Kepada Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak.,C.A.,selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonmi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
5. Kepada Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak, CA., selaku dosen pembimbing utama dan pembimbing akademik yang penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Kepada Bapak Angga Permadi Karpriana, S.E., M.Acc., Ak, selaku dosen pembimbing ke dua yang telah memberikan arahan, dukungan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Ibu Ira Grania Mustika, S.E., M.M, selaku dosen penguji 1, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

   Kepada Ibu Tiya Nurfauzia, S.Ak., M.Ak, selaku dosen penguji ke 2 yang telah membantu memberikan nasihat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh jajaran dosen pengajar dan staf fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran berharga selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf akademik, tata usaha, dan staf perpustakaan serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa dan membantu penulis dalam memperoleh referensi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada, namun penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya, serta berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khusunya di bidang akuntansi. Saran dan kritik konstruktif dari pembaca akan sangat penulis hargai dan terima dengan hati terbuka

Akhir kata, pnulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan berguna bagi semua pihak.

Pontianak, 25 Juli 2025

Putri Maharani
NIM. B1033211039

ANALISIS RASI KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA DESA SUNGAI ENAU

ABSTRAK

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD dapat mencerminkan kebutuhan-kebutuhan riil dari masyarakat sesuai dengan potensi yang ada serta dapat memenuhi tuntutan anggaran daerah. Pelaksanaan pengukuran dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian pengukuran menagacu pada pendapatan asli daerah, untuk mengukur kemandirian keuangan dibutuhkan beberapa rasio keuangan.

Rasio Kemandirian mengambarkan ketrgantungan atau tidaknya daerah terhadap dana eksternal, Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, Rasio Efisiensi perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

ABSTRAK

The Regional Budget (APBD) serves as an instrument for enhancing public welfare it reflects the community's actual needs aligned with eixisting potential while addressing regional budgetary requirements. Performance assessment involves calculating financial ration based on locally generated revenue (PAD) ; specific ratios are required to measure financial independence. The independence ratio indicates the extent of a region's reliance on external funds; the effectiveness ratio reflects the local govermwnt's sbility to realize planned PAD against targets set based on actual regional potential ; and the efficiency ratio represents the relationship between the costs uncured to generate revenue and the revenue actually received.

Keyword :independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio

ANALISIS RASI KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA DESA SUNGAI ENAU

RINGKASAN SKRIPSI

1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan instrument yang digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD dapat mencerminkan kebutuhan-kebutuhan rill dari masyarakat sesuai dengan potensi yang ada serta dapat memenuhi tuntutan anggaran daerah (SeptiRindawati, 2021:2).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termuat didalam kebijakan umum Angaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD). Penganggaran penerimaan dan pengrluaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memiliki dasar penganggaran.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawabanyang diberikan oleh penyelenggara Negara tas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun, 2018).

Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan sector pablik yang lebih transparasi dan akuntabilitas sehingga dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara luas. Maka dari itu di perlukan laporan keuangan yang handal serta dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah dengan analisis prestasi

pengelolaan sumber daya keuangan daerah sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu melakukan otonomi daerah yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisna & Susanto, 2010).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari analisis kinerja pemerintah daerah, salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014:231).

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah darah untuk member informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Meskipun laporan keuangan dibuat oleh lebih umum dan sederhana agar lebih mudah dipahami semua pihak, tetapi masih banyak yang belum memahami laporan keuangan dengan baik. Bahkan beberapa pihak sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar, karena beberapa pihak berasal dari latar belakang yang berbeda, padahal semua pengguna laporan keuagan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibantudengan analisis laporan keuangan untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis metode keuangan (Mahmudi, 2019).

2. RumusanMasalah

a. Bagaimana struktur pendapatan dan belanjadalam APBD daerah ?
b. Bagaimana rasio keuangan APBD mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah ?
c. Apa saja faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan ?

3. Tujuan Penelitia

a. Menganalisi srasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi APBD daerah.
b. Menilai kinerja kuangan daerah melalui rasio-rasio keuangan.
c. Memeberikan rekomendasi terkait pengelolaan APBD untuk
d. meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

   Untuk menambah dan memperluas wawasan, dan meningkatkan pegetahuan, serta pemahaman tentang suatu rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

b. Bagi Institusi

   Hasil penelitian ini sebagai bahan tambahan bahan bacaan dan pustaka bagimahasiswa/I Universitas Tanjungpura Pontianak ataupun dari pihak mana saja yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah

c. Bagi Masyarakat Dapat memberikan kemakmuran masyarakat, membangun fasilitas dan layanan masyarakat serta meningkatkan produktifitas daerah maupun keungan daerah

5. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan penelitian dapat memperoleh data dengan penjabaran yang akurat dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi.Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau satting soaial yang akan dituliskan dalam tulisan yang bersifat naratif, arti dalam penulisanya data dan fakta yang di himpun berbentuk kata atau gambaran dari angka. Dalam penulisan laporan penelitian kuliatatif berisi kutipan data (fakta) yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya (Anggito dan Johan 2018 : 11).

Menurut Ramdhan(202111) mengemukakan bahwa jenis penelitian kualitatif memiliki sifat yang deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang di

gunakan sebagai pemandu agar fokus pada penelitian sesuai fakta dilapangan. Jenis penelitin kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu cenderung lebih menyelidiki tentang suatu peristiwa yang terjadi lalu kemudian mencari data-data yang berbentuk catatan-catatan, tulisan, gambar untuk selanjutnya dijelaskan dan diuraikan dalam sebuah penelitian. Patokan dari penelitian kualitatif deskriptif yaitu teori yang mendasari untuk mengungkap sebuah fakta dilapangan, jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dengan karena dengan menggunakan jenis penelitian deskript if dan mendalam, dapat memperoleh data dengan penjabaran yang akurat dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi

6. Hasil dan pembahasan

Rasio kemandirian

terlihat bahwah pengelolaan keuangan dan aset dasa sungai enau tahun anggaran 2021-2024 tingkat kemandiriannya dikatakan pola hubungan konsukatif (rendah), karena, sangat bergantung pada pemerintah pusat dan belum mampu melakukan otonomi daerah. Hal ini bias dilihat dari rasio kemndirian tahun 2021 sebesar 20,62% , yang termasuk ke dalam kategori rendah sekali. Untuk tahun 2022 mengalami penaikan 29,70% , pada tahun 2023 di kategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif. Pada tahun 2024 di kategorikan rendah dimana pola hubungan konsuktatif karena berada diantara 25%- 50%.

Rasio efektivitas

perhitungan rasio efektivitas desa sungai enau yaitu sebesar 100% yang berarti bahwa kemampuan kinerja keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset dasa sungai enau ditinjau dari rasio efektivitas dikatakan sangat efektif dalam merealisasikan pemerintahan daerah desa sungai enau diawali pada tahun 2021 dan 2024

rasio efisiensi

hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah darah pada tahun 2021 sebesar 96,96%, pada tahun 2022 sebesar 99,34% pada tahun 2023 sebesar 99,43% pada tahun 2024 sebesar 98,49% . Kinerja keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset desa dari rasio efisiensi, dikategorikan sangat efisiensi, karena

kemampuan daerah desa sungai enau dalam menjalankan tugas sesuai dengan kategori rasio efisiensi apabila yang dicapai minimal 1 (satu) atau dibawah 100 persen dikatakan sangat efisensi.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan daerah dengan rasio keuangan daerah yaitu hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuagan dan aset daerah untuk untuk rasio kemandirian pada tahu 2021-2024 masuk dalam kategori rendah sekali, kerena hasil pengukuran yang berada di posisi 0% - 25%. Pengukuran pada rasio efektivitas pada tahun 2021-2024 masuk dalam kategori tidak sangat efektif karena hasil pengukuran 100%. Pengukuran efisiensi masuk kedalam kategori efisien, karena hasil pengukuran 90%-100% pada tahun 2021-2024. Pengukuran rasio keserasian untuk belanja rutin di peroleh 99,43% pad tahun 2022, pengukuran rasio keserasian untuk belanja modal diperoleh 60,87% pad tahun 2022. Perhitungan pertumbuhan untuk pertumbuhan pendapatan di peroleh 20,54% pada tahun 2022,perhitungan pertumbuhan belanja pada belanja rutin diperoleh 87,71% pada tahun 2024, perhitungan pertumbuhan belanja pada belanja modal diperoleh 83,30% pada tahun 2022.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **i**
PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBAR YURIDIS ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**
A. Kinerja 5
B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6
C. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 12
D. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 13
E. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 14
F. Analisis Rasio Keuangan Pada APBD 15

BAB III METODE PENELITIAN **33**
A. Jenis penelitian 33
B. Tempat dan Waktu Penelitian 34
C. Subjek dan Objek Penelitian 34
D. Teknik Pengumpulan Data 35
E. Teknik Analisis Data 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....36
A. Hasil Penelitian 36
1. Rasio Kemandirian.....37
2. Rasio Efektivitas 38
3. Rasio Efisiensi 39
B. Pembahasan Hasil 40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 46
A. Kesimpulan 46
B. Keterbatasan.....46
C. Saran 46
Daftar Pustaka.....48
Lampiran 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 17
Tabel 2.2 Kriteria efektivitas pengelolaan keuangan daerah 18
Tabel 2.3 Kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah.....19
Tabel 2.4 Penelitian terdahulu.....21
Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Desa Sungai Enau Tahun 2021-2024 37
Tabel 4.2 Rasio Efektivitas Desa Sungai Enau Tahun 2021-2024.....38
Tabel 4.3 Rasio Efisiensi Desa Suangai Enau Tahun 2021-2024 39
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Kemandirian Tahun 2021-2024.....43
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2021-2024.....44
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efisiensi Tahun 2021-2024.....44
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Keserasian Tahun2021-2024 44
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Tahun 2021-2024.....45

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah pusat dalam hal keuangan berupa dana transfer, hal tersebut tentunya didukung oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah tentunya bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, kemampuan daerah tersebut adalah kegiatan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengusahakan, mengelola serta mengembangkan setiap poteni yang ada di daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya tanpa harus bergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemrintah pusat (Siregar, 2020).

Keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat diamati dari kemandirian daerah dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuagan (Susanto, 2019:82).

Untuk menjaga kualitas kredibilitas laporan keuangan maka analisis tersebut membutuhkan tehnik dan cara tertentu yang sesuai agar kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemegang kebijakan dan pengambilan keputusan. Ada beberapa teknik analisis unrtuk menganalisis laporan keuangan, seperti analisis varians, analisis rasio, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediksi. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah melakukan perhitungan menggunakan rasio keuangan dimana analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil elemen laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ketahun (Harahap, 2020).

Kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelengaraan daerah.

Pelaksanaan pengukuran dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian pengukuran mengacu pada pendapatan asli daerah, untuk mengukur kemandirian keuangan dibutuhkan beberapa rasio keuangan yang terdiri dari : Rasio Kemandirian, Rasio Efertivitas, Rasio Efesiensi (Mahmudi, 2019).

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan instrument yang digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD dapat mencerminkan kebutuhan-kebutuhan rill dari masyarakat sesuai dengan potensi yang ada serta dapat memenuhi tuntutan anggaran daerah (SeptiRindawati, 2021:2).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termuat didalam kebijakan umum Angaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD). Penganggaran penerimaan dan pengrluaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memiliki dasar penganggaran.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawabanyang diberikan oleh penyelenggara Negara tas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun, 2018).

Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan sector pablik yang lebih transparasi dan akuntabilitas sehingga dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara luas. Maka dari itu di perlukan laporan keuangan yang handal serta dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu melakukan otonomi daerah

yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisna & Susanto, 2010).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari analisis kinerja pemerintah daerah, salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014:231).

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah darah untuk member informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Meskipun laporan keuangan dibuat oleh lebih umum dan sederhana agar lebih mudah dipahami semua pihak, tetapi masih banyak yang belum memahami laporan keuangan dengan baik. Bahkan beberapa pihak sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar, karena beberapa pihak berasal dari latar belakang yang berbeda, padahal semua pengguna laporan keuagan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibantudengan analisis laporan keuangan untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis metode keuangan (Mahmudi, 2019).

B. RumusanMasalah

1. Bagaimana struktur pendapatan dan belanjadalam APBD daerah ?
2. Bagaimana rasio keuangan APBD mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan ?

C. Tujuan Penelitia

1. Menganalisi srasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi APBD daerah.
2. Menilai kinerja kuangan daerah melalui rasio-rasio keuangan.
3. Memeberikan rekomendasi terkait pengelolaan APBD untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

   Untuk menambah dan memperluas wawasan, dan meningkatkan pegetahuan, serta pemahaman tentang suatu rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
2. Bagi Institusi

   Hasil penelitian ini sebagai bahan tambahan bahan bacaan dan pustaka bagimahasiswa/I Universitas Tanjungpura Pontianak ataupun dari pihak mana saja yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah
3. Bagi Masyarakat Dapat memberikan kemakmuran masyarakat, membangun fasilitas dan layanan masyarakat serta meningkatkan produktifitas daerah maupun keungan daerah